



EVALUASI PROGRAM KURIKULUM MERDEKA DI KABUPATEN PONOROGO MENGGUNAKAN MODEL CIPP

Rengga Aprilia

Universitas Negeri Surabaya

Feby Eka Listinai

Universitas Negeri Surabaya

Mufarrihul Hazin

Universitas Negeri Surabaya

Alamat: Jl. Ketintang, Ketintang, Kec. Gayungan, Kota Surabaya, Jawa Timur 60231

Korespondensi penulis: rengga.22052@mhs.unesa.ac.id

***Abstract.** The curriculum is the key to the success of learning. Therefore, in order to achieve this success, it is necessary to conduct evaluations to improve and analyze the implementation readiness of the curriculum, to be used as consideration in making decisions. This research examines the implementation of the Merdeka curriculum. This study was conducted to assess and evaluate the implementation of the Merdeka curriculum program in Ponorogo Regency using the CIPP evaluation model (Context, Input, Process, and Product). Data sources were obtained from interviews conducted with the Head of the Elementary School Department in Ponorogo Regency. The interview results were then analyzed using qualitative descriptive analysis. The conclusion drawn from this research is that the implementation of the Merdeka curriculum program in Ponorogo is carried out well, although it is hindered by some obstacles such as internet networks that are not accessible in all areas*

***Keywords:** CIPP, Program Evaluation, Independent Curriculum*

Abstrak. Kurikulum merupakan kunci utama terlaksananya kesuksesan dalam pembelajaran. Sehingga dalam rangka mencapai kesuksesan tersebut perlu dilakukannya evaluasi untuk meningkatkan serta menganalisis keterlaksanaan implementasi kurikulum, untum dijadikan sebagai suatu bahan pertimbangan yang digunakan untuk mengambil suatu Keputusan. Adapun dalam penelitian ini peneliti mengkaji mengenai implementasi kurikulum Merdeka. Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji serta mengevaluasi keterlaksanaan program kurikulum Merdeka di Kabupaten Ponorogo dengan menggunakan model evaluasi CIPP (Context, Input, Process, dan Product). Sumber data yang diperoleh didapat dari wawancara yang dilakukan dengan Kepala Bidang Sekolah Dasar di Kabupaten Ponorogo. hasil wawancara yang diperoleh kemudian akan dianalisis dengan melakukan analisis deskriptif kualitatif. Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah implementasi program kurikulum Merdeka yang ada di Ponorogo dilaksanakan dengan baik, meskipun terkendala beberapa hambatan misalnya jaringan intetrnt yang tidak semua daerah dapat menjangkaunya.

Kata Kunci: CIPP, Evaluasi Program, Kurikulum Merdeka.

Received Mei 10, 2024; Revised Mei 29, 2024; Juni 2, 2024

**Corresponding author, e-mail address*

LATAR BELAKANG

Baik dan buruknya kualitas proses dan hasil pembelajaran berhubungan dengan pendidik dan peserta didik dalam implementasi suatu program pembelajaran. Kemudian akan dilihat apakah hasil yang dicapai dalam pembelajaran telah dicapai dengan maksimal dan sesuai dengan tujuan atau belum melalui kegiatan evaluasi. Sehingga dengan melakukan evaluasi, setiap informasi yang diperoleh dari proses pembelajaran yang sebelumnya telah dilaksanakan, untuk dapat melihat dan menganalisis setiap kekurangan dan kelebihan yang ada dalam proses dan program pembelajaran agar dapat ditingkatkan dimasa depan (Kurniawati, 2020).

Dalam sistem pendidikan, penting untuk dilaksanakan evaluasi pendidikan. Dimana dalam pelaksanaan evaluasi program pendidikan ini dilakukan dengan tujuan untuk melihat seberapa tinggi atau rendahnya tingkat keberhasilan suatu program yang dilaksanakan. Beberapa ahli telah menemukan model dan konsep mengenai evaluasi terhadap kinerja suatu organisasi dalam beberapa aspek. Adapun model evaluasi yang sering digunakan salah satunya adalah model CIPP yang merupakan kepanjangan dari Konteks, Input, Proses, dan Produk, untuk diimplementasikan dalam pengambilan suatu Keputusan serta untuk menyajikan data dan informasi akuntabilitas. Model CIPP ini dianggap sebagai model evaluasi yang cukup lengkap serta cocok dan sesuai untuk diimplementasikan dalam mengevaluasi suatu program pendidikan (Antariksa et al., 2022).

Kurikulum merupakan seperangkat aturan yang dibuat dan harus ditaati dengan tujuan untuk memperbarui dan memperbaiki kurikulum yang telah digunakan sebelumnya yang tidak sesuai, dan juga untuk menciptakan serta menumbuhkan pengalaman serta ditujukan untuk memaksimalkan pembelajaran peserta didik (Agustin, 2024). Oleh karena itu penting untuk melakukan evaluasi dalam implementasi kurikulum. Evaluasi kurikulum ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kurikulum yang digunakan telah sesuai dan relevan. Evaluasi kurikulum ini dilaksanakan agar dapat dinilai dan dilihat apakah ada hal-hal yang perlu diperbaiki, dipertahankan atau ditingkatkan pada setiap komponen pelaksanaan penilaiannya (Agustin, 2024).

Kurikulum Merdeka merupakan inovasi dalam dunia pendidikan yang mempunyai beberapa manfaat bagi peserta didik dan sistem pendidikan. Adapun kurikulum Merdeka ini juga dikenal karena fleksibilitasnya. Dalam kurikulum Merdeka, peserta didik diberikan kebebasan untuk memilih minat mereka terkait dengan mata Pelajaran yang mereka minati, serta metode pembelajaran mana yang paling sesuai, juga disesuaikan pula kecepatan mereka dalam pembelajaran. Dengan ini, memungkinkan bagi peserta didik untuk mempelajari hal-hal yang mereka sukai dan yang mereka butuhkan (Amalia et al).

Kurikulum ini mendukung peserta didik untuk mengembangkan dan memperluas keterampilan yang lebih dalam lagi dibandingkan dengan sekedar pengetahuan yang berkaitan dengan akademik. Kurikulum Merdeka menekankan pengembangan peserta didik pada keterampilan kepemimpinan, kreativitas, inovasi, keterampilan dalam memecahkan masalah dan mencari Solusi atas permasalahan tersebut. Keterampilan ini dimaksudkan untuk membantu peserta didik dalam menghadapi tantangan yang mungkin akan dihadapi nanti ketika mereka lulus. Dalam kurikulum ini, masing-masing peserta didik dianggap sebagai individu sehingga memiliki potensi dan keunikan masing-masing.

Kurikulum Merdeka memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk mempelajari mata Pelajaran yang diterima dengan disesuaikan pada gaya belajar dan kecepatan peserta didik. Hal ini memberikan kesempatan bagi mereka untuk mampu memenuhi kebutuhan masing-masing individu peserta didik untuk mencapai potensi yang mereka miliki secara maksimal (wardiyah et al).

Dalam pengimplementasian kurikulum Merdeka, evaluasi memiliki peran yang sangat krusial dalam mengukur Tingkat ketercapaian kompetensi yang dimiliki oleh peserta didik. Konsep model evaluasi CIPP merupakan salah satu model evaluasi yang sering digunakan dalam mengevaluasi program pendidikan. Model CIPP inipun dapat digunakan untuk mengevaluasi kurikulum Merdeka. Model evaluasi ini terdiri atas empat komponen utama, yakni Context, Input, Process, dan Product. Dimana pada masing-masing komponennya mempunyai pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengannya. Dengan menggunakan model CIPP mampu membantu evaluator untuk mengetahui kesesuaian dan keefektifan kurikulum yang selaras dengan harapan dan tujuan yang telah dibuat. Penggunaan pendekatan ini, mampu dilakukan penilaian dengan menyeluruh terhadap setiap aspek yang ada dalam kurikulum serta memberikan pemahaman yang baik mengenai kekuatan dan kelemahan apa yang ada dalam perencanaan, dalam implementasi dan hasil akhirnya (Mubai et al).

METODE PENELITIAN

Evaluasi Program Kurikulum Merdeka di Kabupaten Ponorogo menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode kualitatif menurut Creswell (1998) digunakan karena masalah yang diteliti sangat kompleks dan peneliti bermaksud memahami situasi secara lebih mendalam serta ingin menganalisis lebih jauh lagi tentang disposisi berpikir kreatif siswa yang tidak akan dapat diketahui dengan menggunakan metode penelitian kuantitatif. Kemudian Creswell (2010) juga menyatakan bahwa kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai atau diperoleh dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau cara-cara lain dari kuantifikasi. Selanjutnya menurut Bogdan dan Bikken (1992), penelitian kualitatif adalah salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian kualitatif ini adalah Model CIPP. Model evaluasi CIPP adalah suatu model evaluasi yang dikembangkan oleh Stufflebeam yang bertujuan untuk membantu dalam perbaikan kurikulum, tetapi juga untuk mengambil keputusan apakah suatu program itu dihentikan saja jika tidak menghasilkan manfaat yang signifikan.

Model ini mengandung empat komponen, yakni konteks, input, proses dan produk, dan masing-masing perlu penilaian sendiri. Evaluasi konteks meliputi penelitian mengenai lingkungan sekolah, pengaruh diluar sekolah. Bila evaluasi konteks memadai, maka evaluasi input, yakni strategi implementasi kurikulum ditinjau dari segi efektivitas dan ekonomi. Kemudian diadakan evaluasi proses dan produk, misalnya kongruensi antara rencana kegiatan dan kegiatan yang nyata. Model ini mengutamakan evaluasi formatif yang kontinu sebagai cara untuk meningkatkan hasil belajar. Namun fokus penelitian bukan hanya hasil belajar melainkan keseluruhan kurikulum serta lingkungan di sekitar sekolah tersebut. Pemilihan model ini didasarkan karena dapat menentukan

standar yang harus dipertimbangkan di dalam faktor kognitif, afektif, dan psikomotor, kemampuan guru mengajar, administrasi sekolah, fasilitas, alat dan sumber mengajar, ekstrakurikuler, data yang dikumpulkan dibandingkan dan dinilai berdasarkan standar hal tersebut. Kurikulum yang menjadi bahan evaluasi yakni Kurikulum Merdeka, Kurikulum Merdeka menjadi program yang diharapkan dapat melakukan pemulihan dalam pembelajaran, dimana menawarkan 3 karakteristik diantaranya pembelajaran berbasis proyek pengembangan soft skill dan karakter sesuai dengan profil pelajar pancasila, pembelajaran pada materi esensial dan struktur kurikulum yang lebih fleksibel (Jojo & Sihotang, 2022).

Pelaksanaan kurikulum merdeka Yang diwenangkan pada satuan pendidikan tentunya tidak luput dari peran guru yang akan menjadi pelaksana ketika pembelajaran. Sebagai seorang fasilitator, seorang guru dituntut untuk mampu memberikan pengalaman kegiatan pembelajaran yang baik agar ruang merdeka bagi peserta didik dapat tercapai (Setyaningsih, 2020), Guru bisa menguasai dan memahami implementasi kurikulum merdeka, siswa dapat diarahkan hingga dapat menyesuaikan alur. Siswa sepenuhnya bisa belajar dan menyesuaikan dengan kualitas pembelajarannya yang berawal dari guru.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konteks : Evaluasi Komponen Konteks Program Kurikulum Merdeka di Kabupaten Ponorogo

Dalam evaluasi kurikulum Merdeka yang menggunakan model CIPP, komponen konteks ini mengacu pada sebuah pemahaman yang komprehensif mengenai lingkungan pendidikan yang memberikan pengaruh pada bagaimana kurikulum Merdeka diimplementasikan. Sangat penting untuk memahami konteks dengan menyeluruh. Hal ini dikarenakan terdapat beberapa faktor yang mampu mempengaruhi keberhasilan dan implementasi kurikulum Merdeka. Dengan memahami konteks secara maksimal, hasil evaluasi mampu memberikan pemahaman dan wawasan yang relevan dan akurat serta mampu memberikan rekomendasi dengan benar dan tepat dengan tujuan agar keefektifitasan kurikulum terus meningkat. Pada evaluasi konteks, metode yang digunakan pada pengumpulan data dilakukan dengan mencakup kegiatan peninjauan kebijakan serat dokumen, melakukan wawancara dengan stakeholder, observasi secara langsung, dan dilakukan dengan menganalisis data sekunder yang didapat dengan relevan (Ekayana & Ratnaya, 2022).

Pada evaluasi kurikulum Merdeka, komponen konteks sangat penting untuk dianalisis dan dipahami. Aspek konteks ini mengacu pada lingkungan sosial, ekonomu, budaya, politik, serta institusi Dimana kurikulum tersebut diimplementasikan. Evaluasi konteks ditujukan untuk menganalisis dan memahami faktor apa saja yang dapat memberikan dampak pada kurikulum dan pengaruh implementasinya.

Dibawah ini adalah beberapa poin penting yang harus dipertimbangkan dalam mengevaluasi konteks kurikulum.

1. Kebijakan dan tujuan kurikulum, dalam evaluasi konteks diperlukan pemahaman yang mendalam mengenai kebijakan dan tujuan dari kurikulum Merdeka.
2. Evaluasi konteks yang kedua membahas mengenai karakteristik budaya dan masyarakat Dimana kurikulum Merdeka diimplementasikan. Evaluasi konteks

akan meniai tentang faktor seperti norma-norma sosial, nilai-nilai budaya, harapan masyarakat terhadap pendidikan dan kepercayaan yang dianut oleh masyarakat setempat. Pada beberapa kasus, kurikulum Merdeka disesuaikan dengan pertimbangan keunikan budaya yang dimiliki oleh masyarakat setempat (Inniyah & Mulawarman, 2021).

3. Evaluasi konteks juga akan mempertimbangkan dan memperhatikan mengenai ketersediaan fasilitas dan infrastruktur yang menunjang proses pendidikan serta sumber daya yang mungkin mendukung implementasi kurikulum Merdeka. Infrastruktur yang dimaksud misalnya adalah perpustakaan, UKS, laboratorium serta kemudahan akses terhadap pendidikan. Sedangkan pada sumber daya mencakup materi pembelajaran, computer, buku teks serta pendidik yang berkualitas.
4. Evaluasi konteks pada aspek sosial ekonomi juga memiliki pengaruh yang sangat penting dalam implementasi kurikulum Merdeka. Dalam evaluasi konteks melibatkan pengetahuan mengenai kondisi sosial ekonomi peserta didik, termasuk dalam kesenjangan sosial, Tingkat kemiskinan, serta aksesibilitas terhadap pendidikan. Faktor tersebut mampu memberikan pengaruh yang besar terhadap implementasi kurikulum Merdeka. Evaluasi konteks ini akan mempertimbangkan usaha untuk menghadapi dan mengatasi kesenjangan sosial dan ekonomi yang dihadapi menggunakan kurikulum Merdeka (Amalia et al., 2023).
5. Peraturan dan kebijakan pendidikan, Dimana evaluasi konteks dalam hal ini akan mempertimbangkan peraturan dan kebijakan pendidikan yang mengatur mengenai bagaimana kurikulum Merdeka diimplementasikan. Pada evaluasi ini, nantinya akan dilihat apakah terdapat kecocokan pada kurikulum Merdeka dengan kerangka kebijakan pendidikan yang telah ada, kemudian juga dilihat adakah tantangan atau hambatan yang dihadapi dalam pengimplementasian kurikulum Merdeka yang berhubungan dengan kebijakan dan peraturan yang diterapkan.

Melalui pertimbangan-pertimbangan aspek yang berkaitan dengan evaluasi konteks ini, dapat diperoleh lagi pengetahuan dan pemahaman mengenai bagaimana fungsi serta bagaimana kurikulum Merdeka beradaptasi dalam pengimplementasiannya di tempat yang berbeda. Pada evaluasi ini, kita juga bisa mendapatkan informasi dan data mengenai sejauhmana kurikulum Merdeka berhasil diimplementasikan serta kita dapat menganalisis faktor apa saja yang berpengaruh terhadap hasil implementasinya. Evaluasi konteks mampu mempermudah dalam merencanakan penyesuaian atau intervensi yang dibutuhkan dalam rangka memastikan bahwa implementasi kurikulum Merdeka telah selaras dengan kebutuhan pendidikan yang memiliki kondisi yang berbeda. Contoh mudahnya adalah kurikulum Merdeka yang telah diterapkan mungkin belum relevan dan tidak sesuai dengan kebudayaan serta kearifan lokal daerah setempat sehingga perlu dilaksanakan penyesuaian dengan mempertimbangkan keterbatasan sumber daya yang ada dalam infrastruktur pendidikan (Wardiyah et al., 2023).

Disisi lain, evaluasi konteks ini juga mampu membantu evaluator dalam melakukan identifikasi terhadap tantangan dan peluang yang mungkin terjadi saat kurikulum Merdeka diimplementasikan. Melalui pemahaman pada evaluasi konteks dengan menyeluruh, stake holder mampu melakukan antisipasi serta mencari Solus jika muncul suatu tantangan atau hambatan dalam pengimplementasian kurikulum Merdeka (Syamsiar et al., 2023).

Adapun dalam penelitian ini proses wawancara dilakukan dengan Bapak Edy Supiryanto, M.Pd., selaku Ketua Bidang Pembinaan Sekolah Dasar di Kabupaten Ponorogo. Wawancara dilakukan di Gedung Dinas Pendidikan Ponorogo.

Menjawab lima pertanyaan yang seharusnya dipertimbangkan dalam melakukan evaluasi konteks, yang pertama adalah pemahaman mengenai tujuan dan kebijakan kurikulum Merdeka. Dalam evaluasi konteks ini akan dibahas mengenai kesiapan seluruh stake holder dalam mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Menurut Bapak Edy dijelaskan bahwasannya menurut letak geografisnya, kabupaten Ponorogo didalamnya terdapat beberapa daerah yang berada di dataran tinggi, sehingga akses terhadap fasilitas pendidikan belum maksimal. Akses terhadap internet utamanya, masih ada beberapa daerah di kabupaten Ponorogo yang mengalami kesulitan dalam mengakses internet. Kurikulum Merdeka sendiri banyak memiliki program kegiatan yang berhubungan dengan teknologi dan akses internet, sehingga hal ini menyulitkan daerah-daerah tersebut dalam mengimplementasikan kurikulum Merdeka secara maksimal. Namun, disebutkan juga bahwasannya secara keseluruhan kondisi infrastruktur yang ada di kabupaten Ponorogo telah dinilai siap dalam mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Kurang lebih dalam jangka waktu dua tahun terakhir kesiapan infrastruktur sekolah dasar dapat dikatakan hampir 80%. Dengan rician dari seluruh sekolah dasar yang berjumlah 573 sekolah, hanya terdapat kurang lebih 40 sekolah saja yang belum memiliki kesiapan infrastruktur. Sedangkan, pada jenjang sekolah menengah sudah hampir 90% sekolah menengah yang ada di Kabupaten Ponorogo memiliki kesiapan infrastruktur yang baik dalam rangka mengimplementasikan kurikulum Merdeka.

Selain itu karakteristik serta budaya yang ada di Ponorogo juga sangat mendukung implementasi kurikulum Merdeka. Hal ini dibuktikan dengan antusiasme masyarakat dalam mendukung implementasi kurikulum Merdeka. Sebagai contoh, wali murid yang rela mengeluarkan biaya untuk membantu sekolah dalam melaksanakan program yang ada di kurikulum Merdeka seperti menghias kelas dengan tema, membiayai peserta didik yang mengikuti kegiatan hafidz qur'an seperti biaya transportasi, biaya konsumsi dan lain-lain dengan dana wali murid sendiri. Selain itu, dalam mengimplementasikan kurikulum Merdeka, budaya lokal yang ada di Kabupaten Ponorogo juga sangat diperhatikan, dengan mengadakan dan mewajibkan adanya ekstrakurikuler Reog di setiap sekolah yang ada di Kabupaten Ponorogo untuk melestarikan budaya daerah setempat.

Input: Evaluasi Komponen Input dalam Pelaksanaan Kurikulum Merdeka

Pada evaluasi input digunakan untuk menentukan setiap asset dan sumber daya yang dimiliki, Solusi dan kemungkinan adanya strategi yang digunakan dalam memenuhi setiap kebutuhan yang diidentifikasi. Tujuan dari evaluasi input adalah untuk menentukan sumber daya yang tersedia, dalam rangka untuk membantu serta mengatur alternatif dan Keputusan yang diambil, strategi apa yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut, serta cara untuk mencapainya. evaluasi input dilakukan dengan menganalisis peluang, asset dan problem yang dapat digunakan untuk membantu dalam pengambilan Keputusan dengan cara melakukan identifikasi prioritas-prioritas, tujuan serta manfaat yang mungkin diperoleh dari suatu program, kemudian melakukan penilaian dalam pendekatan alternatif, membuat rencana dalam melakukan suatu tindakan, rencana staff serta dana yang digunakan untuk fasilitas dan juga potensi yang dimiliki untuk memenuhi setiap tujuan yang ditargetkan dan kebutuhan yang dimiliki. Pada evaluasi input, hal yang paling penting adalah dimaksudkan untuk mencari serta menentukan program dengan maksud

menciptakan perubahan yang diperlukan. Evaluasi ini bermaksud mencari potensi akan sumber daya yang tersedia dan juga hambatan dan tantangan yang mungkin dihadapi. Adapun tujuan utama dari evaluasi input ini adalah untuk membantu klien dalam mengkaji setiap alternatif yang ada yang berkaitan dengan seluruh kebutuhan yang mungkin muncul dalam suatu organisasi. Mudah-mudahan, evaluasi alternatif ini digunakan oleh evaluator untuk membantu klien dalam menghindari setiap inovasi yang mungkin tidak berguna dan tidak memberikan manfaat, serta menghindari kegagalan yang mungkin akan terjadi sehingga tidak menghambur-hamburkan sumber daya yang dimiliki (Kurniawati, 2020).

Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar di Kabupaten Ponorogo saat diwawancarai menyebutkan bahwa di Ponorogo sendiri hambatan dan tantangan yang perlu dihadapi dalam mengimplementasikan kurikulum Merdeka sangat minim, terutama terkait dengan infrastrukturnya. Di Kabupaten Ponorogo, sampai saat ini implementasi kurikulum Merdeka yang dilakukan telah didukung pula oleh kemajuan teknologi, termasuk Google dan berbagai media massa yang telah ada. Sehingga pada praktiknya, dibuktikan dengan guru-guru yang ada disalah satu daerah di Kabupaten Ponorogo terutama di desa Balong membuat komunitas dengan sebutan Balong Bergerak yang didalamnya mengampu banyak guru penggerak yang diwadahi dengan baik sehingga dapat membantu dan membimbing guru-guru yang lain. Adapun kendala dalam aspek infrastruktur ini relatif kecil, hanya ada beberapa daerah yang ada di Ponorogo yang belum dapat akses internet dengan baik, sehingga komunitas-komunitas yang dibuat dengan memanfaatkan akses teknologi dan internet tersebut belum dapat diikuti dan belum dapat dijangkau.

Dalam segi pemanfaatan sumber daya, Kabupaten Ponorogo telah memanfaatkan sumber daya yang dimiliki dengan maksimal. Terkait dengan pengimplementasian kurikulum Merdeka, sumber daya yang terlibat telah tersedia dengan baik. Kurikulum Merdeka hampir dilaksanakan seluruhnya dengan baik. Hal ini dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo dengan membreakdown setiap elemen dengan baik. Mulai dari pengawas sekolah yang pada jenjang dasar berjumlah 46 pengawas dengan 1 koordinator pengawas yang tersebar masing-masing daerah dengan hampir 200 guru penggerak dari Tingkat SD maupun SMP. Hal ini dikarenakan guru penggerak melakukan pelatihan dengan materi mengenai implementasi kurikulum Merdeka, sehingga guru yang mengikuti pelatihan ini akan membimbing dan membantu guru-guru lain yang tidak mengikuti pelatihan tersebut. Sehingga hal ini akan sangat membantu guru-guru yang tidak mengikuti pelatihan mengenai implementasi kurikulum Merdeka.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam mengimplementasikan kurikulum Merdeka, Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo memaksimalkan sumber daya yang dimiliki, dengan cara memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya dan tidak menggunakannya dengan sembarang sehingga sumber daya yang dimiliki akhirnya terbuang sia-sia.

Dalam melakukan evaluasi input, Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo melakukan analisis mengenai hambatan dan tantangan yang seringkali dihadapi dalam pengimplementasian kurikulum Merdeka. Salah satu hambatan yang dialami adalah misalnya akses terhadap internet yang belum memadai. Sehingga mempersulit daerah tersebut dalam mengimplementasikan kurikulum Merdeka secara maksimal. selain itu, hambatan yang dialami adalah terdapat beberapa guru yang cenderung merasa lebih

nyaman ketika menggunakan kurikulum 2013 dibandingkan dengan kurikulum Merdeka, disebabkan karena kurikulum 2013 telah dilaksanakan dalam jangka waktu yang cukup lama sehingga mereka lebih terbiasa dalam menggunakan kurikulum 2013 dan sedikit kesulitan dalam menggunakan kurikulum baru yakni kurikulum Merdeka. Beberapa guru yang tidak lagi berusia muda juga sering dijumpai merasa sedikit kesulitan dalam mengimplementasikan kurikulum Merdeka dikarenakan kurikulum Merdeka ini menuntut guru untuk mengikuti dan mengetahui perkembangan teknologi dalam mendukung pengimplementasian kurikulum. Namun, hal ini hanya terjadi ketika kurikulum Merdeka baru dikenalkan, seiring dengan berjalannya waktu, guru-guru mulai menerima dan mempelajari bagaimana pengaplikasian kurikulum Merdeka dengan mengikuti pendidikan dan pelatihan serta cara-cara yang lainnya.

Dalam proses perencanaannya, Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo mendesign kurikulum Merdeka dengan disesuaikan pada kebutuhan dan karakteristik peserta didik yang ada di Kabupaten Ponorogo. Selain itu, pengimplementasian kurikulum Merdeka juga disesuaikan dengan kondisi lingkungan Kabupaten Ponorogo. Misalnya adalah pada daerah perkotaan, implementasi kurikulum Merdeka (IKM) menggunakan jalur mandiri berbagi, sedangkan pada daerah pedesaan yang masih terkendala teknologi menggunakan IKM jalur mandiri belajar atau jalur mandiri berubah.

Adapun kesiapan perangkat pembelajaran juga sangat diperhatikan oleh dinas dan pemerintah setempat untuk mendukung peserta didik dalam melaksanakan pembelajaran menggunakan kurikulum Merdeka. Misalnya adalah dengan memaksimalkan akses terhadap perangkat elektronik seperti computer dan lain sebagainya. Serta mengusahakan untuk pemerataan akses internet di setiap desa yang ada di Kabupaten Ponorogo sehingga pelaksanaan kurikulum Merdeka akan dapat implementasikan di seluruh daerah.

Adapun saat diwawancarai, narasumber mengungkapkan bahwa sekolah sangat terbantu dengan adanya program kampus Merdeka yang dilakukan di daerah-daerah yang memerlukan. Program ini sangat membantu sekolah dalam membantu pelaksanaan pembelajaran terutama dalam hal Teknologi Informasi dan Digital Dimana mahasiswa yang mengikuti kampus mengajar ini dinilai lebih ahli dalam mengoperasikan teknologi yang ada sehingga ketersediaan teknologi sangat dapat dimanfaatkan serta metode pembelajaran yang ada dapat dikembangkan dengan lebih inovatif dan kreatif serta dapat menarik minat peserta didik untuk belajar dengan giat. Sehingga kesiapan Kabupaten Ponorogo dalam mengimplementasikan kurikulum Merdeka telah berjalan dengan sangat baik.

Proses: Evaluasi Pelaksanaan Program Kurikulum Merdeka

Evaluasi proses yaitu upaya untuk mencari jawaban atas pertanyaan apakah program yang sedang dilaksanakan berjalan secara baik atau tidak. Evaluasi proses dalam model CIPP menunjuk pada “apa” kegiatan yang dilakukan dalam program, “siapa” orang yang berperan serta bertanggungjawab atas berjalannya suatu kegiatan “bagaimana” upaya selesainya suatu kegiatan tersebut. Dalam model CIPP, evaluasi proses diarahkan pada seberapa jauh kegiatan yang dilaksanakan di dalam program sudah terlaksana sesuai dengan rencana.

Pelaksanaan pembelajaran dan pengajaran kurikulum merdeka di kabupaten Ponorogo sangat terbantu dengan adanya kampus mengajar, pembekalan pada mahasiswa

mengajar dapat membantu pelaksanaan pembelajaran dan pengajaran kurikulum merdeka karena kampus harus dapat menghasilkan lulusan yang siap bekerja dan bersaing dengan sistem pasar yang terus berkembang. Kampus merdeka juga memberikan tantangan dan kesempatan untuk pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan Mahasiswa sesuai di era teknologi ini, serta mengembangkan Kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan melalui kenyataan dan dinamika lapangan seperti persyaratan kemampuan, Permasalahan riil, interaksi sosial, kolaborasi, manajemen diri, tuntutan kinerja, target dan pencapaiannya (Kholik et al., 2022). Keterampilan dan Pengetahuan ini dapat diperoleh peserta didik atau mahasiswa dengan mengikuti salah satu atau beberapa kegiatan belajar di luar (kelas) perguruan tinggi selama dua semester, yaitu magang/praktek kerja di Industri atau tempat kerja lainnya, melaksanakan proyek pengabdian kepada masyarakat di desa, mengajar di satuan pendidikan, mengikuti pertukaran mahasiswa, melakukan penelitian, melakukan kegiatan kewirausahaan, membuat studi/proyek independen, dan mengikuti program kemanusiaan.

Dinas Pendidikan sebagai staf pendidikan sudah menyediakan Diklat Pelatihan bagi guru-guru penggerak sebagai sarana implementasi kurikulum merdeka. Manfaat pelaksanaan aktivitas pembelajaran program Diklat, diantaranya;

1. Guru dapat menyusun perangkat pembelajaran Kurikulum Merdeka sesuai dengan keadaan dan kondisi sekolah masing-masing.
2. Mampu menyusun jurnal pembelajaran guru, menyelesaikan kasus yang terjadi di sekolah masing-masing berdasarkan karakteristik masalah yang terjadi,
3. Mampu mengoperasikan komputer dan menggunakan sekalipun belum mahir betul,
4. Mampu mendesain dan merancang Modul Pembelajaran dengan menggunakan program komputer,
5. Mampu menyusun Asesmen Sumatif berdasarkan sekolah masing-masing, dan
6. Mampu melaksanakan tugas guru penggerak.

Meski demikian masih terdapat hambatan bagi guru yang berada di daerah pinggiran, jumlah siswa sedikit juga dapat mempengaruhi, apalagi dalam kurikulum merdeka terdapat praktik yang tidak memungkinkan jika hanya terdapat sedikit siswa. Akan tetapi hambatan tersebut bisa diperbaiki dengan cara berkerjasama dengan lembaga pendidikan dengan cara menggabungkan beberapa Lembaga dalam pelaksanaan, seperti terjadi kendala jaringan internet yang tidak mumpuni untuk daerah pinggiran namun dapat diatasi dengan buku fisik ataupun modul pendamping pembelajaran untuk setiap Lembaga.

Profil Siswa Pancasila merupakan komponen kurikulum merdeka belajar yang menekankan pengembangan karakter sebagai bagian dari upaya peningkatan taraf pendidikan di Indonesia. Untuk menjaga keseimbangan antara inovasi teknologi dan pembangunan manusia di era globalisasi dan kemajuan teknologi saat ini, diperlukan fungsi value dan character learning (Kurniawaty & Faiz, 2022). fokus peningkatan profil siswa Pancasila adalah pada pengembangan karakter dan keterampilan hidup praktis mereka melalui budaya sekolah, pembelajaran ekstrakurikuler dan proyek untuk meningkatkan reputasi siswa Pancasila, dan budaya kerja. (RAHAYUNINGSIH, 2022)

Menggunakan Pergub tahun 2021 tentang kegiatan keagamaan dalam tertulis bahwa terdapat kegiatan yang berkaitan dengan ekstrakurikuler keagamaan pada tahun 2000. Kabupaten Ponorogo telah mewisudakan 1200 tahfidz. Kegiatan ekstrakurikuler

ini dapat menjadi upaya pematapan dan pengayaan nilai-nilai dan norma serta pengembangan kepribadian, bakat dan minat peserta didik pendidikan agama yang dilaksanakan diluar jam intrakurikuler serta membentuk karakter budi pekerti sesuai dengan 10 muwasafat muslim, yakni 10 kriteria yang perlu ditanamkan dalam diri untuk menjana keperibadian Muslim yang syumul dan perlu ada dalam diri seorang muslim.

Masih banyak terdapat perbedaan sarana dukungan pembelajaran para siswa, di SD mangkujayan terdapat penilaian di asesment-nya gridnya lebih tinggi dikarenakan beberapa siswa dari kalangan Menengah Atas sehingga didukung dengan les private dan sebagainya sedangkan di pinggiran belum bisa sehingga Grid assesment-nya sedikit lebih rendah namun tetap dilakukan penilaian berbasis proyek dikarenakan apabila tidak menggunakan Project Based Learning anak-anak dinilai tidak maksimal. Kurikulum Merdeka masih memiliki sistem lower, middle dan upper dalam tingkatan pencapaian siswanya, walaupun sistem ranking sudah dihapuskan.

Oleh karena itu masih banyak orang yang mengira kurikulum merdeka merupakan kurikulum yang bebas dan merdeka, padahal salah besar kurikulum merdeka hanya memberikan hak siswa untuk bebas berkreaitivitas serta mengasah skill untuk masa depan. Misalnya saja untuk pengerjaan soal, kurikulum merdeka harus terikat dengan asesmen sumatif dan naratif, sangat dianjurkan para pengajar memberikan siswa/i nya dengan soal-soal literasi untuk menambah minat baca anak. Dinas Pendidikan juga menyediakan Master soal yang disusun oleh guru jika nanti digunakan untuk ujian tetapi jika tidak digunakan pun tidak apa-apa. Untuk soal keagamaan Dinas Pendidikan membagi soal Islam dan Kristen, jadi untuk asesmen bebas menyesuaikan agama para siswa/I dan lingkungan sekolah.

Produk: Evaluasi Output dan Hasil dari Program Kurikulum Merdeka

Evaluasi produk dilakukan pada akhir suatu program atau kegiatan. Evaluasi ini dimaksudkan untuk mengukur pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, berdasarkan standar dan kriteria tertentu. Evaluasi produk diarahkan pada hal yang menunjukkan perubahan yang terjadi pada masukan mentah, dalam contoh program makanan tambahan anak sekolah adalah siswa yang menerima makanan tambahan. Evaluasi produk merupakan tahap kahir dari serangkaian evaluasi program, evaluasi ini berupaya mengidentifikasi dan mengakses keluaran dan manfaat, baik yang direncana atau yang tidak direncana, baik jangka pendek maupun jangka panjang.

A. Prestasi Akademik Siswa

Pak Edy selaku kepala bidang pendidikan dasar menegaskan bahwa penerapan kurikulum merdeka belajar berlangsung dengan baik di sekolah karena penerapan yang dilakukan bertahap dengan informasi dan sosilisasi berupa pelatihan yang bertahap pula sehingga guru diberikan waktu untuk dapat mengelolah materi ajar pada bidang studi yang diampuh serta pengelompokan bidang studi sudah pernah dialami dan dipelajari oleh guru pada kurikulum K13. Penerapan kurikulum merdeka belajar di sekolah dasar memberikan guru kefokusn untuk mengajar dengan satu bidang studi saja sehingga pembuatan administrasi berupa silabus dan RPP dapat terselesaikan dan dibuat seramping mungkin untuk efisiensi waktu evaluasi baik untuk guru. (Bonal & González, 2020; Nurasih et al., 2022) manfaatnya siswa dapat mendapatkan pembelajaran yang berkualitas dan dapat mempelajari ilmu secara mendalam. Sementara di bidang lomba, karena para siswa/i sudah pasti memiliki skill literasi maka mudah saja memenangkan

perlombaan literasi. Sebab karena itu SIPLah sekolah akan membaik dan sekolah akan mendapatkan penghargaan. Kabupaten Ponorogo mendapatkan juara atau penghargaan dari Kementerian sehingga diundang ke Surabaya, lalu kabupaten Nganjuk melakukan studi banding ke Ponorogo mengenai hal literasi tersebut.

Kurikulum merdeka yang dijalankan di Ponorogo untuk aspek keterampilan budaya yakni ekstrakurikuler Reog. Banyak SMP dan SMA memiliki ekstrakurikuler sebagai sarana dalam mengembangkan Reog. Ekstrakurikuler tersebut terbentuk karena adanya keinginan sekolah untuk menumbuhkan kecintaan terhadap Reog akademik siswa.

Dilihat dari penelitian STKIP berkoordinasi dengan dinas pendidikan yang mengukur tingkat kepuasan masyarakat terkait dengan penerapan kurikulum merdeka tanggapan masyarakat terkait dengan hasil yang telah dicapai pada kurikulum merdeka menunjukkan hasil bahwa masyarakat masih bingung dan masih belum menerima sepenuhnya dikarenakan ada full day serta masih banyak sekolah yang menerapkan 5 hari belajar. Sehingga bisa dipastikan bahwa masyarakat tidak ingin terlalu lama waktu pembelajaran di sekolah karena tidak akan efektif. Pada dasarnya masyarakat mendukung peningkatan implementasi kurikulum merdeka, namun untuk tahun ini tidak ada anggaran. Tetapi untuk pelaksanaan diklat guru dan aktivitas ekstrakurikuler reog di tanggung oleh komite orang tua. Hal tersebut merupakan salah satu peran masyarakat dalam mendukung implementasi kurikulum merdeka.

KESIMPULAN

Kabupaten Ponorogo dalam mengimplementasikan kurikulum Merdeka telah dilakukan dengan baik. Meskipun masih terdapat beberapa permasalahan dan tantangan yang dialami seperti keterbatasan akses internet yang dialami di beberapa daerah yang sulit dijangkau. Selain itu, karakteristik dan budaya yang ada di Kabupaten Ponorogo dinilai sudah mendukung dalam pengimplementasian kurikulum Merdeka. Dalam memaksimalkan implementasinya pemerintah kabupaten Ponorogo memaksimalkan implementasi kurikulum Merdeka dengan melakukan pemerataan akses serta membantu daerah yang sulit untuk mendapatkan akses internet dengan mengadakan pelatihan-pelatihan misalnya pelatihan guru penggerak untuk kemudian ilmu yang didapat disebar luaskan kepada daerah-daerah yang sulit mendapatkan akses internet, selain itu pemerintah memanfaatkan sumber daya yang ada dengan sangat baik dan maksimal. Implementasi kurikulum Merdeka di Kabupaten Ponorogo juga memberikan dampak baik berupa peningkatan kualitas pendidikan serta capaian prestasi belajar peserta didik sehingga sangat penting untuk terus ditingkatkan.

DAFTAR REFERENSI

- Agustin, R. (2024). Evaluasi Kurikulum Merdeka Menggunakan Model Cipp Pada Sekolah Dasar. *Cendekia Pendidikan*, 3(1), 19–29.
- Amalia, R., Anuar, A. Bin, & Fahmi, A. (2023). 9. Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM): Efektifitas Pelaksanaan Magang Mahasiswa Bimbingan dan Konseling Dengan Menggunakan Metode CIPP. *G-Couns: Jurnal Bimbingan Dan Konseling*, 7(02), 239–251.

- Antariksa, W. F., Fattah, A., & Utami, M. A. P. (2022). Evaluasi program pendidikan pesantren mahasiswa model CIPP (Context, Input, Process, Product). *Evaluasi: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 6(1), 75–86.
- Beatty, A., Berkhout, E., Bima, L., Pradhan, M., & Suryadarma, D. (2021). Schooling Progress, learning reversal: Indonesia's learning profiles between 2000 and 2014. *International Journal of Educational Development*, 85(June). <https://doi.org/10.1016/j.ijedudev.2021.10>
- Ekayana, A. A. G., & Ratnaya, I. G. (2022). Evaluasi Kurikulum Program Sarjana Sistem Komputer Menggunakan Model CIPP Stufflebeam. *Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Pendidikan*, 6(3), 366–376.
- Fahrian Firdaus Syafi'i. (2021). Merdeka Belajar: sekolah penggerak. November, 46–47.
- Faiz, A., & Faridah, F. (2022). Program Guru Penggerak Sebagai Sumber Belajar. *Konstruktivisme : Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran*, 14(1), 82–88. <https://doi.org/10.35457/konstruk.v14i1.1876>
- Faiz, A., Parhan, M., & Ananda, R. (2022). Paradigma Baru dalam Kurikulum Prototipe. *Edukatif : Jurnal Ilmu Pendidikan*, 4(1), 1544–1550. <https://doi.org/10.31004/edukatif.v4i1.2410>
- Inniyah, S., & Mulawarman, W. G. (2021). Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Program Sekolah Ramah Anak Pada Smp Negeri 2 Tenggarong Dengan Model Evaluasi Cipp. *Jurnal Ilmu Manajemen Dan Pendidikan*, 1(2), 39–54.
- Kholik, A., Bisri, H., Lathifah, Z. K., Kartakusumah, B., Maufur, M., & Prasetyo, T. (2022). Impelementasi Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Berdasarkan Persepsi Dosen dan Mahasiswa. *Jurnal Basicedu*, 6(1), 738–748 doi: <https://doi.org/10.51878/social.v1i3.925>
- Kurniawati, E. W. (2020). Evaluasi Program pendidikan perspektif model cipp (context, input, process, product). *GHAITSA: Islamic Education Journal*, 1(1), 19–25.
- Moleong, L. J., (2011), *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Rahayuningsih, F. (2021) 'Internalisasi Filosofi Pendidikan Ki Hajar Dewantara Dalam Mewujudkan Profil Pelajar Pancasila', *Social: Jurnal Inovasi Pendidikan IPS*, 1(3), pp.177–187.
- Syamsiar, H., Muzakki, M., Ratnaya, I. G., & Widiana, I. W. (2023). Evaluasi Kurikulum Merdeka Belajar Berbasis CIPP. *Journal of Education and Instruction (JOEAI)*, 6(2), 536–544.
- Wardiyah, J., Budianti, Y., Al Farabi, M., Sirojuddin, A., & Fatikh, M. A. (2023). Merdeka Belajar Activity Unit at Madrasah Aliyah: Program Evaluation Study Using CIPP Method. *Nazhruna: Jurnal Pendidikan Islam*, 6(1), 119–138.